

**ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECTS THE BUDGET ABSORPTION IN THE RIAU AND
KEPRI SUPREME COURTS WITH ORGANISATIONAL COMMITMENTS AS THE MODERATING
FACTOR**

M.Irwan Tofani¹, Amir Hasan², Nasrizal³

^{1,2&3}Universitas Riau

Email: irwantofani@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

This study aims to prove The Influence of The Workload, Utilization of information Technology, Planning, Administration, Human Resources, and Procurement of Goods and Services Towards Budgeting Absorption with Organizational Commitment as a Moderating Factor. This type of research was carried out in The District Court and The Religious Court in The Jurisdiction of Riau Supreme Court and The Riau Religious Supreme Court. This research was a survey research by census method, while the distribution technique used a questionnaire distributed to The Mandate of Budget Users, Resolve Making Officer, Tresures of Expenditure and Goods, Service Procurement Officer at the District Courts and The Religious Courts in The Jurisdiction Of Riau Supreme Court and The Riau Religious Supreme Court and Riau Island, Total questionnaires distributed were 165 as many as 138 were returned questionnaires. Data analysis was performed by examining the Stuctural Equation Model (SEM) method based on Partial Least Squares (PLS). From the test values of each independent variable on the dependent variable the end result was Utilization of Information Technologi, Planning, Administration, Human Resources, and Procurement of Goods and Service Towards Budgeting Absorption, While The Workload does not affect Budgeting Absorption. The Commitment of Management Also has a significant effect on Budgeting Absorption, The Commitment of Management was able to influence the relationship of Human Resouces to Budgeting Absorption, but could not strengthen the relationship between the outlining and budgeting absorption. The results also showed that R² was 0,642 which explained that the percentage contribution of the influence of the independent variable (The Utilization of Information Technology, The Outlining, The Management, The Human Resources, and The Procurement of Goods and Service) to the dependent variable (Budgeting Absorption) was 64,2 % while the rest 35,8 % was influenced by other variables that were not included in this study.

Keywords: *The Workload, Utilization of Information Technology, Planning, Administration, Human Resources, Procurement of Goods and Services, and Budgeting Absorption.*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA UNIT
KERJA MAHKAMAH AGUNG DI WILAYAH RIAU DAN KEPRI DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI SEBAGAI FAKTOR MODERASI**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Beban Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Faktor Moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Riau. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan metode sensus, sedangkan teknik penyebarannya menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dan Kepri, kuesioner yang disebarakan 165, sebanyak 138 kuesioner yang kembali. Analisis data dilakukan dengan pengujian metode Struktural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS). Dari nilai uji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen memperoleh hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran, sedangkan Beban Kerja tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Komitmen Organisasi juga pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, Komitmen Organisasi mampu mempengaruhi hubungan sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, namun tidak bisa memperkuat hubungan antara perencanaan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil dimana R² sebesar 0.642 dimana ini menjelaskan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Beban Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa terhadap variabel dependen (Penyerapan Anggaran).

Kata kunci: *Beban Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa, Dan Penyerapan Anggaran*

PENDAHULUAN

Keterlambatan penyerapan anggaran belanja pemerintah (*Government expenditure realization*) di setiap akhir tahun anggaran merupakan topik pembicaraan yang hangat untuk didiskusikan. Permasalahan mengenai terlambatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah khususnya kementerian dan lembaga sering dianggap sebagai buruknya kinerja pemerintah. Penyerapan anggaran belanja sendiri sangat penting untuk mendorong terciptanya (*multiplier effect*) terhadap ekonomi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja (*Performanced Based Budget*) sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran.

Pada tahun anggaran 2014, pola penyerapan APBN baru dipacu pada semester kedua yaitu tepatnya pada triwulan ke IV. Pada akhir Semester I tahun anggaran 2014, penyerapan anggaran APBN hanya sebesar 28% masih sangat jauh dari kondisi ideal. Dengan munculnya Paket Peraturan Keuangan Negara yaitu Undang - Undang R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan negara diharapkan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan itu diharapkan penyerapan anggaran juga akan meningkat secara proporsional.

Keterlambatan penyerapan anggaran terjadi juga di Mahkamah Agung yang memiliki anggaran bersumber dari APBN, khususnya Pengadilan. Pengadilan merupakan unit kerja Mahkamah Agung yang berada di daerah berstatus sebagai Kantor Daerah dan berkantor di masing – masing kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Salah satu contoh pengadilan yang masih rendah penyerapannya di Wilayah Pengadilan Tinggi Riau adalah Pengadilan Negeri Bangkinang bahwa realisasi anggaran triwulan II atau per 30 Juni 2014 hanya mencapai 23,74 % atau sebesar Rp.2.311.094.158,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.733.494.000,-

Menurut MENPAN (1997), beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pada organisasi publik, kinerja manajer publik dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan, penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya (Mardiasmo:2009). Sehingga, beban kerja pejabat pengelola keuangan yang tinggi akan menurunkan kinerja satker yang tunjukan oleh besar kecilnya penyerapan anggaran di satker tersebut. Ada berbagai penelitian mengenai beban kerja yaitu penelitian Alfia Rahma (2014) tentang Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta menyimpulkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh keterlambatan pembentukan satker dan proses penerbitan dokumen SPM (surat perintah membayar) dan beban kerja KPPN. Selanjutnya penelitian terkait beban kerja profesi auditor pada penelitian Fahriani (2015) di KAP Big Four menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik Big Four.

Selain itu, penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Teori yang sering digunakan dalam mendukung bukti empiris tentang penggunaan teknologi adalah TAM (*Technology Acceptance Model*). Menurut teori TAM bahwa niat seseorang untuk menggunakan system atau teknologi ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), yakni tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya, dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), merupakan tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi membuatnya lebih mudah menyelesaikan pekerjaan (Davis, 1989). Penelitian Kuncoro (2013) menemukan bahwa penerapan teknologi informasi yaitu aplikasi SiPP pada Dinas PU Kalimantan Timur mempengaruhi penyerapan anggaran dimana terlihat penyerapan anggaran lebih tinggi setelah menggunakan aplikasi SiPP dibandingkan sebelum diterapkannya program aplikasi SiPP. Dengan adanya aplikasi SiPP, Kuasa Pengguna Anggaran dapat memantau/mengawasi secara langsung progres penyerapan anggaran ditahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Perencanaan merupakan proses sistematis yang memiliki prosedur dan jadwal yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu tahapan perencanaan dalam sebuah organisasi sangat penting terutama pada organisasi sektor publik yaitu menjadi factor penentu keberhasilan pencapaian kinerja yang ditunjukan dengan tingginya penyerapan anggaran. Penelitian Kuswoyo (2012), mengenai faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri, menyimpulkan bahwa faktor perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyebab penumpukan anggaran belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar juga menemukan

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)

bahwa perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. Hasil penelitian Shah dkk. (2007), Herriyanto (2012), Sulaiman dkk. (2012), Albulescu dan Goyeau (2013) menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah, yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah. Namun penelitian Putri (2014) menyimpulkan hal berbeda bahwa kegiatan perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh administrasi. Administrasi pada proses anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terutama karena adanya kesalahan input informasi. Administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Gie, 1980). Tujuan dari organisasi publik adalah meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat (Mardiasmo:2002) yang ditunjukan oleh realisasi penyerapan anggaran. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor administrasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran (Tatar, 2010). Beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara administrasi terhadap penyerapan anggaran (Priatno, 2013. Putri, 2013. Fitriani dkk., 2015).

Sumber daya manusia juga mempengaruhi penyerapan anggaran. Menurut Sutrisno (2009), sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Faktor Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di tingkat satker, terutama sumber daya manusia pengelola keuangan, sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah (Amiruddin, 2009).

Selanjutnya, yang juga mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pengadaan barang dan jasa. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 dan perubahannya menjadi Perpres No. 04 tahun 2015 dan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai upaya mempercepat pelayanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perpres tersebut memberikan mandat pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *E-Procurement (E-Proc)*, yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara online yang merupakan salah satu jalan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum diberlakukan E-Proc memerlukan waktu yang cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya daya serap anggaran. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Kuswoyo, 2011. Priatno, 2013. Nugroho, 2013). Penelitian Carlin (2014) menemukan bahwa dokumen Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Sebaliknya dalam penelitian Riska (2018) Pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Mengacu dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dalam penelitian ini peneliti akhirnya menarik kesimpulan bahwa penulis akan menganalisis penyerapan anggaran dengan variabel tambahan beban kerja pejabat di satker pengadilan dan dampak teknologi informasi terhadap penyerapan anggaran dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi serta perbedaan terletak pada sampel, daerah, tahun penelitian dan alat uji statistic yang digunakan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SDM terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana komitmen organisasi dapat memoderasi perencanaan dan SDM terhadap penyerapan anggaran .

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran menurut (Kuncoro: 2013) merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR.

Menurut Bastian (2010:193), anggaran merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran merupakan wujud realisasi tanggung jawab institusi pemerintahan yang telah diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya menyediakan kebutuhan masyarakat (publik) menggunakan dana dari masyarakat. Penyerapan anggaran merepresentasikan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan.

Beban Kerja

Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam rangka waktu tertentu. Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya (Dedi, 2016). Beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan kelelahan baik fisik maupun psikis, sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi karena pengulangan gerak akan menimbulkan kebosanan, rasa monoton (Henny, 2016). Faktor kebosanan dalam pekerjaan rutin sehari-hari atau karena pekerjaan yang terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan pekerja (Manuaba, 2000).

Tekhnologi Informasi

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam system informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Maharsi, 2000). Menurut Jurnal dan Supomo (2002) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap perilaku berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas. Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan besar bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Perencanaan

Perencanaan sangat erat hubungannya dengan penyerapan anggaran karena kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah (Shah et. al, 2007). Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Setiap rencana kerja merupakan landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi pada perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu, apabila dalam melaksanakan perencanaan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan maka kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan terjadi dan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.

Administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (Siagian, 2014). Menurut Putri (2014), berpendapat administrasi menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan, karena kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan yang disusun dalam sistem pemerintahan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di tingkat satker, terutama sumber daya manusia pengelola keuangan, sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah (Amiruddin, 2009). Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 dan perubahannya menjadi Perpres No. 04 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai upaya mempercepat pelayanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perpres tersebut memberikan mandat pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *E-Procurement (E-Proc)*, yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara online yang merupakan salah satu jalan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum diberlakukan E-Proc memerlukan waktu yang cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya daya serap anggaran.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan keinginan anggota untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Sopiah, 2008). Faizzah dan Mildawati (2007) berpendapat komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat terhadap organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi. Individu yang memiliki ikatan emosional terhadap organisasi akan memicu tumbuhnya komitmen organisasional sehingga individu akan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi (Latuheru, 2006). Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen organisasi maka tujuan perusahaan lebih mudah tercapai.

Pengaruh Beban Kerja terhadap Penyerapan Anggaran

Beban kerja yang berlebih dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dari pejabat pengelola keuangan yang pada gilirannya menurunkan penyerapan anggaran. Tingginya beban kerja (workload) staf pengelola keuangan, yang mana staf pengelola keuangan seringkali rangkap jabatan dengan tugas kepaniteraan, misalnya bendahara pengeluaran dirangkap oleh jurusita pengganti, yang memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan sedangkan waktu yang dimiliki terbatas maka staf pengelola keuangan akan cenderung tidak lebih fokus dalam melaksanakan penatausahaan keuangan.

H1: Beban kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penyerapan Anggaran

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan kewajiban bendahara pengeluaran pada satuan kerja ditekankan bahwa tugas bendahara adalah menyusun, menatausahakan dan menyampaikan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ke KPPN sebagai wakil bendahara umum negara (BUN) di daerah. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna. Pemanfaatan teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi.

H2: Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran

Teori public finance menghantarkan bahwa institusi pemerintahan memerlukan perencanaan untuk mengalokasikan sumber anggaran dan mendistribusikan anggaran. Anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan membangun untuk kepentingan masyarakat, pada penyusunannya harus memperhitungkan rencana penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan (Putri, 2014). Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

H3: Perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Time Adminstrasi merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan (goal). Pernyataan tersebut sejalan dengan goal setting theory yang menjabarkan bahwa tujuan yang spesifik dapat mempermudah pencapaian tujuan. Sistem administrasi dan prosedur akuntansi dalam pelaksanaan anggaran merupakan bentuk pembagian kerja yang spesifik dengan tujuan yang rinci sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik oleh setiap individu-individu yang berperan didalamnya.

H4: Administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penyerapan Anggaran

Pada *goal setting theory* peran sumber daya manusia memegang peran penting terutama pada bagaimana menempatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang tepat sesuai spesialisasinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa.

H5 : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Peran institusi publik yang dipaparkan pada teori *public finance* menjelaskan bahwa hubungan dan fungsi

institusi publik dan administrasi ialah berusaha memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat melalui penyusunan dan alokasi anggaran. Salah satu upaya signifikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ialah melalui pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro maupun makro (Fitriany dkk., 2015).

H6 : Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Faizzah dan Mildawati (2007) berpendapat komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat terhadap organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi. Individu yang memiliki ikatan emosional terhadap organisasi akan memicu tumbuhnya komitmen organisasional sehingga individu akan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi (Latuheru, 2006). Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen organisasi maka tujuan perusahaan lebih mudah tercapai.

H7 : Perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang dimoderasi oleh komitmen organisasi.

Pengaruh SDM terhadap Penyerapan Anggaran yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

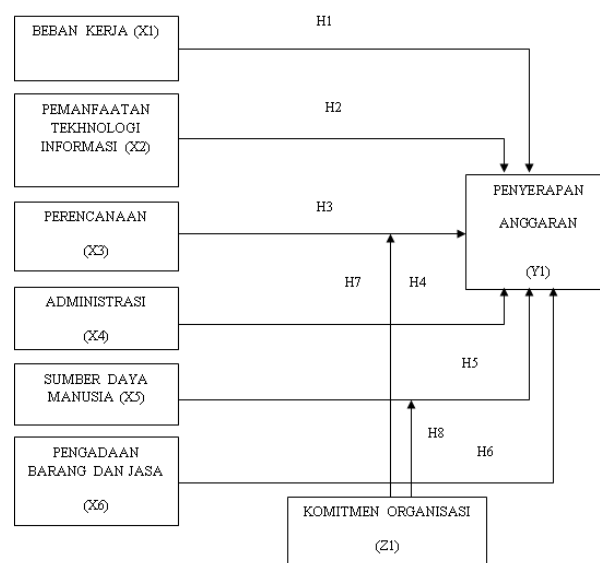
Dalam Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Amirudin (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

H8 : SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang dimoderasi oleh komitmen organisasi.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dengan jumlah 660 orang. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena sampel akan diambil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah sampel yang diharapkan adalah 165 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dan Kepri. Data primer dari penelitian ini adalah berupa jawaban kuesioner yang disebarkan peneliti kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dan Kepri.



Gambar 1. Model Penelitian

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)

Pada penelitian ini Statistik inferensial yang digunakan adalah mengaplikasikan metode Struktural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan Smart PLS 3.0 M3. Pemilihan metode PLS karena Partial Least Square merupakan metode analisis yang *powerfull* dan sering disebut juga sebagai *soft modeling* karena meniadakan asumsi-asumsi *Ordinary Least Squares (OLS)* regresi, seperti data harus terdistribusi normal secara multivariate dan tidak adanya problem multikolinearitas antar variable independen (eksogen) (Ghozali, 2014: 5).

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data, terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui kehandalan (validitas) dan kesahihannya (reliabilitas). Selanjutnya dilakukan evaluasi model persamaan struktural (inner model)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Dari 165 kuesioner yang disebar, sebanyak 130 kuesioner berhasil dikumpulkan dan dapat digunakan untuk penelitian, namun ada dua puluh tujuh kuesioner yang tidak berhasil dikumpulkan dengan alasan kesibukan responden terkait. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 78,78 %. Rekapitulasi penyebaran dan pengembalian kuesioner. Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, semua instrument penelitian mempunyai nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data yang akan digunakan adalah layak dan valid.

Tabel 1.Descriptive Statistics

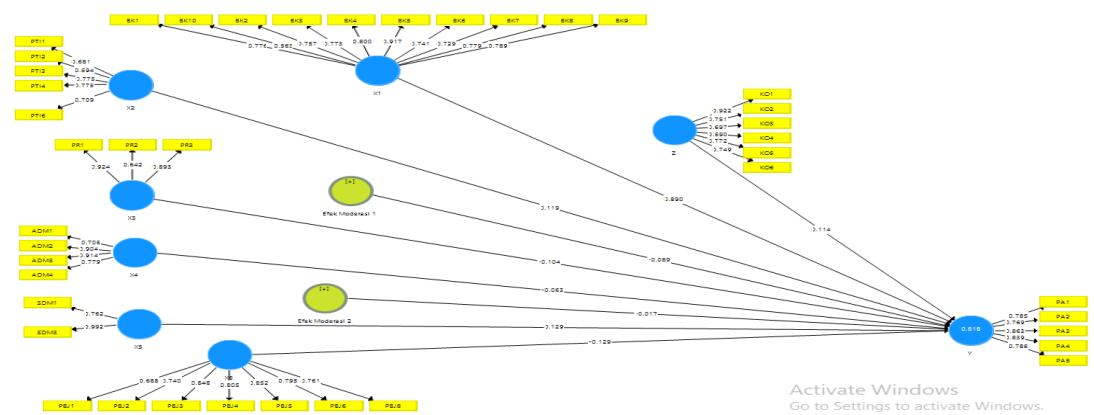
Keterangan	Responden	
	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	165	100%
Kuesioner yang kembali	138	84%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	8	5,79%
Kuesioner yang dapat diolah	130	78,78%

Sumber : Data olahan

Pengujian Evaluasi model pengukuran (outer model)

Hasil Uji Validitas

Analisis dan evaluasi model pengukuran (outer model) dalam gambar hasil calculate-PLS algorithm adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

Gambar 2. Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan reflektif indicator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang diestimasi dengan software PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Menurut Ghozali (2013) untuk penelitian tahap awal dari perkembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 – 0,6 dianggap cukup memenuhi standard. Ukuran reflektif dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,60.

Tabel 2.Outer Loading Variable Penyerapan Anggaran

Variabel	Indikator	Outer loading
Penyerapan Anggaran	Penarikan anggaran sangat proporsional setiap triwulannya	0.766
	Pada akhir tahun terjadi penumpukan pekerjaan terkait dengan penyelesaian proses pencairan	0.768
	Realisasi untuk penyerapan anggaran pekerjaan terkait (program dan kegiatan) tidak pernah mencapai 95 %	0.863
	Mampu mencapai total penyerapan anggaran lebih dari 95 %	0.889
	Pada akhir tahun memiliki sisa anggaran	0.786

Sumber: Data Olahan

Tabel 3.Outer Loading Variable Beban Kerja

Variabel	Indikator	Outer loading
Beban Kerja	Jumlah pegawai yang ada saat ini sudah cukup untuk menangani pekerjaan yang ada	0,776
	Target yang harus saya capai dalam pekerjaan sudah jelas.	0,863
	Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sudah cukup	0,757
	Saya selalu menyelesaikan pekerjaan yang sama tiap harinya	0,773
	Saya harus bekerja sangat cepat untuk menyelesaikan pekerjaan saya	0,800
	Pada saat jam istirahat saya juga mengerjakan pekerjaan saya	0,917
	Pada saat – saat tertentu saya menjadi sangat sibuk dengan pekerjaan saya	0,741
	Saya dapat menikmati pekerjaan yang saya lakukan	0,729
	Beban kerja saya sehari-hari sudah sesuai dengan standar pekerjaan saya	0,779
	Saya dapat meninggalkan kantor ketika waktu telah selesai	0,789

Sumber: Data Olahan

Tabel 4. Outer Loading Variable Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel	Indikator	Outer loading
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Setiap Subbagian pada Pengadilan Negeri/Agama memiliki Komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas	0.681
	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda/ kapasitas bandwidthnya cukup memadai	0.694
	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan	0.775
	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi	0,775
	Laporan akuntansi dan manjerial dihasilkan dari system informasi yang terintegrasi (aplikasi e-Rekon)	0,709

Sumber: Data Olahan

Tabel 5.Outer Loading Variable Perencanaan

Variabel	Indikator	Outer loading
Perencanaan	Setiap Subbagian pada Pengadilan Negeri/Agama memiliki Komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas	0.924
	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda/ kapasitas bandwidthnya cukup memadai	0.642
	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan	0.893

Sumber: Data Olahan

Tabel 6. Outer Loading Variable Administrasi

Variabel	Indikator	Outer loading
Administrasi	Penentuan akun belanja dalam dokumen anggaran (RKA-K/L) sesuai dengan aturan yang Berlaku	0.705
	Waktu antara penyusunan dokumen anggaran dan penelaahan/penelitian dokumen anggaran idealnya tidak terlalu berdekatan	0.904
	Adanya tambahan pagu anggaran (APBN-P) menjadi kendala dalam penyerapan anggaran	0.914
	Pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran/pembebanan APBN harus memadai	0.779

Sumber: Data Olahan

Tabel 7. Outer Loading Variable Sumber Daya Manusia

Variabel	Indikator	Outer loading
Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia di instansi/organisasi bekerja sesuai bidang keahliannya masing-masing	0.762
	Setiap individu memiliki job description sehingga terhindar dari penugasan rangkap	0.992

Sumber: Data Olahan

Tabel 8. Outer Loading Variable Pengadaan Barang Dan Jasa

Variabel	Indikator	Outer loading
Pengadaan Barang dan Jasa	Kurangnya kemampuan pegawai sebagai panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa karena tidak seimbang resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima	0,688
	Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat banyaknya pemberitaan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi	0,740
	Realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai	0,848
	Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres No.4 tahun 2016	0,805
	SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat kurang	0,852
	SK Panitia terlambat ditetapkan	0,795
	Pemeriksaan dan penandatanganan dokumen kontrak oleh panitia/pejabat pengadaan membutuhkan waktu yang lama	0,761

Sumber: Data Olahan

Hasil Uji Discriminant Validity

Pengujian discriminant validity dilakukan untuk membuktikan apakah indikator pada suatu konstruk akan mempunyai loading factor terbesar pada konstruk yang dibentuknya dari pada loading factor dengan konstruk yang lain. Hasil pengujian pada model discriminant validity yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai Discriminant Validity (Cross Loading)

Indikator	Beban Kerja X1	Pemanfaatan Teknologi Informasi X2	Perencanaan X3	Administrasi X4	SDM X5	Pengadaan Barang dan Jasa X6	Komitmen Organisasi Z	Penyerapan Anggaran Y
BK1	0.776	0.631	0.733	0.732	0.627	0.876	0.645	0.631
BK2	0.863	0.844	0.851	0.653	0.649	0.602	0.484	0.847
BK3	0.757	0.724	0.621	0.620	0.736	0.669	0.584	0.617

Indikator	Beban Kerja X1	Pemanfaatan Teknologi Informasi X2	Perencanaan X3	Administrasi X4	SDM X5	Pengadaan Barang dan Jasa X6	Komitmen Organisasi Z	Penyerrapan Anggaran Y
BK4	0.773	0.625	0.519	0.660	0.546	0.665	0.693	0.624
BK5	0.800	0.740	0.544	0.713	0.645	0.508	0.739	0.744
BK6	0.917	0.860	0.857	0.767	0.823	0.662	0.849	0.858
BK7	0.741	0.629	0.726	0.704	0.674	0.780	0.485	0.729
BK8	0.729	0.667	0.665	0.694	0.716	0.813	0.624	0.563
BK9	0.779	0.749	0.745	0.666	0.537	0.564	0.642	0.747
BK10	0.789	0.740	0.737	0.456	0.745	0.646	0.560	0.642
PTI1	0.664	0.681	0.666	0.537	0.583	0.538	0.703	0.563
PTI2	0.663	0.694	0.642	0.624	0.604	0.654	0.641	0.543
PTI3	0.719	0.775	0.623	0.635	0.638	0.645	0.452	0.626
PTI4	0.733	0.775	0.645	0.548	0.658	0.634	0.673	0.641
PTI5	0.661	0.709	0.624	0.646	0.534	0.508	0.701	0.620
P1	0.855	0.833	0.924	0.746	0.836	0.746	0.845	0.835
P2	0.509	0.628	0.642	0.630	0.524	0.634	0.533	0.628
P3	0.846	0.843	0.893	0.835	0.745	0.748	0.789	0.838
AD1	0.873	0.869	0.859	0.705	0.645	0.698	0.456	0.861
AD2	0.813	0.834	0.829	0.904	0.785	0.645	0.847	0.832
AD3	0.870	0.881	0.885	0.914	0.867	0.865	0.575	0.882
AD4	0.864	0.857	0.851	0.779	0.548	0.674	0.746	0.852
SDM1	0.851	0.864	0.867	0.635	0.762	0.643	0.645	0.865
SDM2	0.847	0.839	0.830	0.604	0.992	0.753	0.633	0.827
PBJ1	0.616	0.537	0.627	0.654	0.568	0.688	0.538	0.633
PBJ2	0.620	0.637	0.736	0.706	0.467	0.740	0.631	0.739
PBJ3	0.664	0.772	0.822	0.759	0.710	0.848	0.725	0.679
PBJ4	0.876	0.860	0.864	0.584	0.624	0.805	0.600	0.760
PBJ5	0.602	0.658	0.609	0.704	0.594	0.852	0.665	0.759
PBJ6	0.669	0.691	0.686	0.651	0.640	0.795	0.581	0.636
PBJ7	0.665	0.492	0.397	0.621	0.564	0.761	0.649	0.748
PA1	0.508	0.593	0.671	0.560	0.743	0.645	0.646	0.766
PA2	0.662	0.571	0.678	0.613	0.742	0.593	0.599	0.768
PA3	0.780	0.665	0.768	0.710	0.672	0.765	0.548	0.863
PA4	0.813	0.831	0.829	0.569	0.691	0.686	0.651	0.889
PA5	0.564	0.672	0.682	0.683	0.531	0.402	0.621	0.786

Sumber: Data Olahan

Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *average variance extracted (AVE)* dari masing-masing konstruk. Konstruk yang baik apabila memiliki nilai reliabilitas yang tinggi jika nilainya diatas 0,70 dan AVE berada diatas 0,50. Berikut ini hasil pengujian *composite reliability* dan AVE pada seluruh variable adalah:

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)

Tabel 10. Nilai Composite Reliability dan Average Variance Extracted

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Beban Kerja X1	0.974	0.974	0.976	0.717
Pemanfaatan Teknologi Informasi X2	0.952	0.952	0.959	0.723
Perencanaan X3	0.821	0.822	0.853	0.638
Administrasi X4	0.858	0.859	0.876	0.748
SDM X5	0.912	0.912	0.943	0.847
Pengadaan Barang dan Jasa X6	0.766	0.767	0.783	0.687
Penyerapan Anggaran Y	0.930	0.931	0.945	0.741
Komitmen Organisasi Z	0.825	0.826	0.896	0.741

Sumber: Data Olahan

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian pada model struktural dievaluasi dengan memperhatikan persentase varian yang dijelaskan, yaitu melihat nilai R^2 untuk variabel laten dependen dengan menggunakan nilai *predictive relevance* (Q^2). Besaran Q^2 dengan rentang $0 < Q^2 < 1$, semakin mendekati nilai 1 berarti model semakin baik. Demikian juga sebaliknya apabila dibawah 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Untuk menilai model dengan output PLS dimulai dengan melihat *R-Square* setiap variabel laten. Perubahan nilai *R-Square* yang merupakan uji *goodness-fit-model*. Digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Berikut koefisien determinasi (R^2) dari variable endogen yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Output Goodness-Fit-Model

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Y	0.598	0.479

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan nilai koefisien determinasi R^2 yang disajikan pada tabel 4.16 dapat diketahui nilai Q^2 dengan perhitungan sebagai berikut :

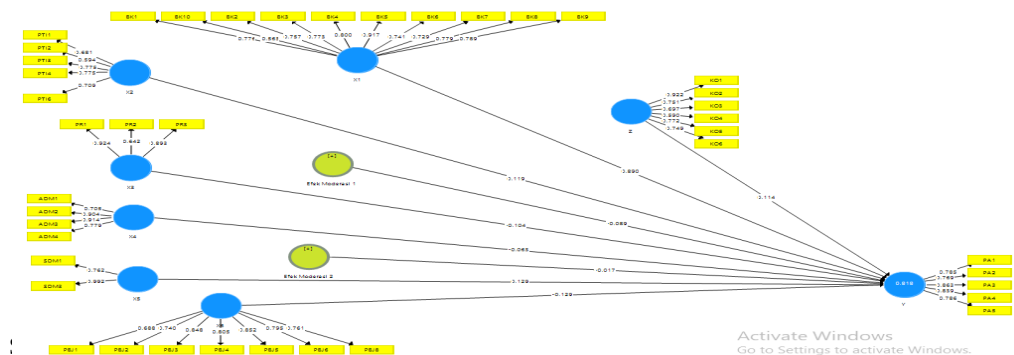
$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R^2) \\
 &= 1 - (1 - 0.5982) \\
 &= 1 - (1 - 0.358) \\
 &= 0.642 \text{ (64.2\%)}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai *predictive relevance* (Q^2) = 0.642 atau 64.2%. artinya akurasi atau ketepatan model penelitian ini dapat menjelaskan keragaman variabel eksogen terhadap endogen sebesar 64,2 %. Sisanya 35,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini. Model ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis artinya Q^2 yang diperoleh dapat dikatakan model yang terbentuk dan memiliki akurasi atau ketepatan model yang baik karena diperoleh nilai diatas 60%. Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini dikatakan memiliki nilai prediktif yang baik dan layak untuk digunakan dalam menguji hipotesis.

Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian pada model struktural dievaluasi dengan memperhatikan persentase varian yang dijelaskan, yaitu melihat nilai R^2 untuk variabel laten dependen dengan menggunakan nilai *predictive relevance* (Q^2). Besaran Q^2 dengan rentang $0 < Q^2 < 1$, semakin mendekati nilai 1 berarti model semakin baik. Demikian juga sebaliknya

apabila dibawah 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Untuk menilai model dengan output PLS dimulai dengan melihat R-Square setiap variabel laten. Perubahan nilai R-Square yang merupakan uji goodness-fit-model. Digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Berikut koefisien determinasi (R²) dari variable endogen yang terlihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3. Model Struktural (Inner Model) Output Smart PLS Bootstrapping

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian Koefisien Pengaruh Jalur Langsung

Hasil pengaruh jalur langsung dapat dilihat pada tabel path coefficient berikut ini:

Tabel 12. Output PLS Path Coefficients

Hipotesis	Pengaruh Jalur Langsung	Koefisien Jalur	t-statistic	p-value	Bukti Empiris
H ₁	Beban Kerja → Penyerapan Anggaran	-0.162	0.375	0.003	Signifikan Diterima
H ₂	Pemanfaatan Teknologi Informasi → Penyerapan Anggaran	0.181	2.963	0.034	Signifikan Diterima
H ₃	Perencanaan → Penyerapan Anggaran	0.302	3.942	0.000	Signifikan Diterima
H ₄	Administrasi → Penyerapan Anggaran	0.221	2.989	0.014	Signifikan Diterima
H ₅	Sumber Daya Manusia → Penyerapan Anggaran	0.576	4.313	0.002	Signifikan Diterima
H ₆	Pengadaan Barang dan jasa → Penyerapan Anggaran	0.341	3.947	0.012	Signifikan Diterima

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel. 12 pada output path coefficients dapat dilihat pengujian pengaruh langsung dan hipotesis penelitian yang bertujuan untuk menjawab apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Berikut penjelasan hipotesis pengaruh langsung:

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar -0,162 dengan nilai signifikan 0,003 < 0,05 atau dibawah 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 0,375 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Semakin rendah beban kerja yang dirasakan oleh pegawai maka penyerapan anggaran akan semakin baik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian Fitriany dan Setiawan (2011), penelitiannya untuk melihat pengaruh *workload* terhadap kualitas audit dengan menggunakan rasio jumlah klien KAP dengan jumlah partner KAP sebagai pengukur tingkat *workload*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *workload* terbukti berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,181 dengan nilai signifikan $0,034 < 0,05$ atau dibawah 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 2,963 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Artinya semakin baik Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh pegawai maka akan semakin baik penyerapan anggaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,302 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ atau dibawah 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 2,942 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,302 dengan nilai signifikan $0,014 < 0,05$ atau dibawah 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 2,989 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,576 dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ atau dibawah 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 4,313 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima.

Pengujian Hipotesis Keenam (H6)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,341 dengan nilai signifikan $0,012 < 0,05$ atau dibawah 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 3,947 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima.

Hasil Pengujian Koefisien Jalur Pengaruh Variabel Moderasi

Pemeriksaan pengaruh variabel moderasi bertujuan mendeteksi kedudukan variabel moderasi peran kepercayaan dalam model. Variabel moderasi dapat di klasifikasikan menjadi empat jenis yaitu : (1) moderasi murni (pure moderation); (2) moderasi semu (quasi moderation); dan (3) moderasi potensial (homologiser moderation) dan (4) moderasi prediktor (predictor moderation). Dari metode pemeriksaan nilai koefisien dan signifikansi maka pengujian hipotesis dan koefisien jalur pengaruh variabel moderasi disajikan pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13. Koefisien Jalur Pengaruh Moderasi dan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh Variabel Moderasi	Koefisien Jalur	T-Statistics	P-Value	Bukti Empiris	Sifat Moderasi
Komitmen Organisasi → Penyerapan Anggaran		0,206	3,631	0,004	-	-
H ₇	Moderating Effect 1	0,077	0.702	0,483	Tidak Signifikan	Murni Moderasi
H ₈	Moderating Effect 2	0,142	4.511	0.012	Signifikan	Kuasi Moderasi

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tabel 4.14 maka pengujian hipotesis pada pengaruh variabel moderasi komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Ketujuh (H7)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,077 dengan nilai signifikan $0,483 < 0,05$ atau dibawah 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 0,483 maka dapat disimpulkan nilai original sample positif mengindikasikan bahwa komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara perencanaan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak.

Pengujian Hipotesis Kedelapan (H8)

Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,142 dengan nilai signifikan $0,012 > 0,05$ atau diatas 5% yang ditunjukkan nilai t-statistik 4,511 maka dapat disimpulkan dari nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan diterima.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan, Administrasi Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan Beban kerja tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan Komitmen pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, Komitmen memperkuat hubungan antara sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, namun Komitmen tidak memperkuat hubungan antara perencanaan terhadap penyerapan anggaran. Adapun saran dari penelitian ini adalah agar peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor religiusitas (keyakinan) terkait dengan penyerapan anggaran yakni dengan meyakini bahwa bekerja merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap manusia terhadap Tuhan YME, bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Riau, disarankan agar terjadinya perubahan *mindset* (pola pikir) pegawai bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban sehingga kualitas kerja mutlak ditingkatkan pada gilirannya akan mencapai *reward* yang diinginkan, serta adanya usulan penambahan pegawai sesuai dengan analisa jabatan pada satker masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- A Usmara, 2003. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Jogyakarta: Amara.
- Akhmad Syakhroza, 2008. Telaah Governance Sistem Keuangan Negara. *Jurnal Usahawan*, (No. 05) TH XXXVI : 37-40
- Abdul Halim, dkk, 2009, *Sistem Pengendalian Manajemen, Cetakan Ketiga, STIM YKPN*, Yogyakarta.
- Arif, Emkhad dan Abdul Halim, 2011. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011, *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado.
- A.S Sulaiman., Hamzah. A.P., dan Priyanto, R., 2012. Penyerapan anggaran di kementerian keuangan RI dan faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal BPPK*, volume 4 tahun 2012.
- Amdri Noviwijaya dan Abdul Rohman, 2013. Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Kasus pada Satker KPPN Semarang I) ,Diponegoro, *Journal Accounting Vol.2 (3) :1*
- Albulescu, C.T., dan Goyean, D, 2013. EU Funds Absorption Rate And The Economic Growth. Timisoara of Economics And Business, vol.6no.20:15317.http://www.tjeb.ro/index.php/tjeb/article/download/TJEB20_153to170/pdf.
- Alfia Rahma, 2014. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Alimuddin, 2018. Analisis penyerapan anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makasar, FE-UNHAS, Makasar.
- Book Reid, G. B. And Nygren., T. E. 1988. The Subjective Workload Assessment technique: a scaling procedure for measuring mental workload. In P. A. Hancock and N. Meshkati (eds). Human Mental workload, Amsterdam: North-Holland . Dalam: Asdyanti, Raldina, 2012. Analisis Hubungan Beban Kerja dan Kinerja Karyawan Departemen Contract Category Management di Chevron Indoasia Business Unit, Universitas Indonesia.
- Bodnar H George and Hopwood S.,1995. William. *Accounting Information System*, edisi bahasa Indonesia, oleh Amir Abadi Jusuf dan Rudi M Tambunan, buku satu edisi keenam, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- BPKP, 2011, *Menyoal Penyerapan Anggaran*, Paris Review, Yogyakarta. Indra Bastian, 2008. Keterlambatan APBD dalam Analisis Siklus, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , Vol. 7 (2): 115-130. *Direktorat Jenderal Anggaran, Penyerapan Anggaran Bukan Budget Performance Indikator*, www.anggaran.depkeu.go.id diakses 15 September 2016.
- Chin W Wynne, Todd Peter. 1991. "On The use Usefulness, ease of use of structural equation Modeling in MIS Research : A note of Caution ". *Management Information System Quarterly*, 21(3).

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)

- Cushing E Barry.1993. *Accounting Information system and organization*, edisi tiga, terjemahan Ruchyat Kosasih, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Controlling Stress And Tension* dalam : Munandar, A. S. 2001. *Stress dan Keselamatan Kerja. Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Carlin Tasya Putri, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Cut Malahayati, Islahuddin dan Hasan Basri, 2015. Analisis Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran dengan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Banda Aceh*, Vol 4(1) :11-19.
- De Lone.,1981.“Small size and Characteristic computer use” *Management Information System Quarterly*,5, p.p.65-77.
- Davis FD.1989. “Perceived Usefulness, Perceived ease of use of Information Technology ”.*Management Information System Quarterly*, 21(3).
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati, 2006. Standar Akuntansi Pemerintah. Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Darwanis, Dana Siswar dan Aulia Rahman, 2012. Pengaruh Kompetensi, Pelatihan dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pada Dana Dekonsentrasi. *Jurnal Akuntansi Vol 2*.Universitas Syiah Kuala, Aceh
- Everly, G. & Girdano, D.A.1979.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013. *Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah*. 20 juni 2014. <http://www.djpk.depkeu.go.id/document/article>.
- Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, (2016). *Data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran (PA)*. Jakarta Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
- Erlina, 2008, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi : 2, Usu Press, Medan.
- Fatma, A. Lubis, 2011, *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*, Terbitan Pertama, USU Press, Medan.
- Egiastyo Dwi Kuncoro, 2013, Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU Provinsi Kaltim, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 1(4):364-373.
- Fadilah, M. Rasuli dan Kamaliah, 2011. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi Vol 9*. Universitas Riau.
- Fitriany dan Liswan Setiawan, 2011. Pengaruh Workload Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Kualitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.Volume 8-10 No 1 hal 36 – 53, Universitas Indonesia.
- Fitriani., N. Masdojo G.N, Suwarti. T, 2015. Exploring Tha Factors That Impact The Accumulation of Budget Absorption in The end of The Fiscal Year 2013: A Case Study in Pekalongan City Of Central Jaya Indonesia. *South Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 3 (Aug.)ISSN 2289-1560.
- Fahriani, Mega Silvia, 2015. Pengaruh Workload dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor di KAP Big Four). *Jurnal Ilmiah Vol 3*. Universitas Bakrie.
- Feriyanto, dkk, 2015, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Mediatara, Yogyakarta.
- Gie. T. Liang., 1980. *Administrasi Perkantoran Modern*. Cetakan ke-10. Penerbit Nur Cahaya, Yogyakarta: 217.
- Gomes. F.C., 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Gatot Imam Santoso, Slamet Widodo dan Sri Warsono, 2014. Analisis Kompetensi Kerja Auditor Pada Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu. Pascasarjana Universitas Bengkulu.
- Handyaningrat, Soewarno, 1988, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Hajimas Agung, Jakarta.
- Hadari Nawawi, (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Keempat.Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hovart, A. (2005). Why Does Nobody Care about The Absorption?. *WIFOWorking Paper*. No. 258. Vienna.
- Hevesi. G. Alan., 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. Dalam : Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penedalihan Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Pontianak.
- Harsono, 2011, *Sistem Administrasi Kepegawaian*, Bandung: Fokusmedia.
- Hendris Heriyanto, 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di Wilayah Jakarta, Tesis, FE-UI, Jakarta.

- Henny Gultom Evita Minaruly, 2016. Pengaruh Kompetensi dan Beban Kerja Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
- Imam Ghozali, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irwan, Dedi, 2011. Pengaruh Penerapan SPIP, Kompetensi SDM dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tesis, Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang.
- I Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati dan I Wayan Mudiarta, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- I.D Kuswoyo, 2012. Analisis atas Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). Tesis. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- I Gede Eka Arya Kusuma, 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Pada Ketepatan Anggaran (Studi Empiris di SKPD Pemerintah Provinsi Bali). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana : Bali. Tidak Dipublikasikan.
- Imam Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate*, Cetakan Kedelapan, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Julian Henry Sembiring, 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Tesis, FE-USU, Medan.
- Kerlinger, Fred N., 1986. *Psychology, Sociology Research, Statistical Methods*. 3 rd Edition. Foundations of Behavioral Research. New York.
- Lopez-Acevedo, D. M. 2005. The Effect Of Workload Comperenssion On Audit Quality. *Working Paper*, University Of Arkansas.
- Locke, E. A., 1968. Toward a theory of taks mofi-vation and incentives. *Organizationan Behavior and human Performance*, 3. 157-189.
- Lee,Jr, Robert D., and Ronald W. Johnson. 1978. *Public Budgeting System, second edition*. Baltimore : University Park Press.
- Lopez-Acevedo, D. M. 2005. The Effect Of Workload Comperenssion On Audit Quality. *Working Paper*, University Of Arkansas
- Mowday, Richard T. et al., 1982. *Employee – Organizational Linkages: The Psychology Of Commitment Absentism And Turnover*. Academic Press Inc., New York.
- [Menpan] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 1997. *Definisi Beban Kerja*. [internet]. [diunduh 03 Desember 2019]. Tersedia pada: <http://www.bkn.go.id>.
- Manuaba, 2000. Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Procendings Seminar Nasional Ergonomi*, Surabaya.
- Manasan., Rosari G., dan Mercado., Reben G., 2001. *An Assessment ot The Absorptive Capacity Of Agencies Involved In The Publik Works Sector*. *Philippine Institute For Developmen Studies, Discussion Paper Series No. 2001-17*. <http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0117.pdf>.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta Menpan. 1997. Definisi Beban Kerja. <http://www.bkn.go.id>. (diakses pada tanggal 6 Juni 2014)
- Ministry of Finance, Planning and Economic Development Uganda, 2011. *Absortive Capacity Constrain*.
- Monica, Andrea and Gabriela Monica., 2013. The role of the Government in the absorption of the European Funds in Romania, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 2, Issue 4.
- M. Arsyad Ridani., 2014. Analisis penyerapan anggaran bekanja daerah di Kabupaten Bulungan tahun 2009-2013. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- M Ali Fikri, Inapty, Biana Adha dan Martiningsih, RR Sri Pancawati, 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating. Universitas Mataram NTB. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII* Medan.
- Nurfaizzah dan Titik Mildawati, 2007. Pengaruh Penyusunan Partisipasi penganggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi pada Pemkot Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis Sektor Publik (JAMBPS)* Vol.3 No.3.
- Nasution, Hafifah. 2012. Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Paper Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta.
- Novie Purba Bertina Karokaro, 2017. Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Penggunaan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderating. Tesis, FE-USU, Sumatera Utara.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)

- P.A Priatno, 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Artikel Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000. Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Robinson Shah and Fabozzi, 2007. Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. *Public Sector and Governance and Accountability Series: Local Budgeting*. World Bank.
- Rossen, Harvey S., dan Ted Gayer, 2008. Public Finance. New York: McGraw-Hill.
- Riduwan dan Achmad E. Kuncoro, 2011. Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis. Cetakan Ketiga. Penerbit Alfabeta, Bandung, (37 – 49).
- Raldina Asdyanti, 2012. Analisis Hubungan Beban Kerja dan Kinerja Karyawan Departemen Contract Category Management di Chevron Indoasia Business Unit, Universitas Indonesia.
- Retno Miliasih, 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 Di Wilayah KPPN Pekanbaru, Tesis, Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Spencer., M. Lyle., 1993. Competence At Work. New York. Wiley Sarjono Haryadi, Julianita Winda. 2011. SPSS vs LISREL sebuah pengantar aplikasi untuk Riset, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suma'mur, P.K, 1996. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Sri Maharsi, 2000. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen, *Jurnal Administrasi Bisnis, Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sopiah, 2008. *Prilaku Organisasional*, Yogyakarta: AMUS.
- Solikhin, 2014. Kecenderungan penumpukan belanja pemerintah pusat di akhir tahun anggaran dan mengeksploitasi faktor-faktor penyebab pada satker di Wilayah KPPN Purwokerto.
- Triandis, Harry. C., 1971. Attitude and Attitude Change. Toronto: John Willey & Sons. Winaya, Kuna. Manajemen Sumber Daya Manusia (Lanjutan) Edisi Ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Thompson Ronald, Howell, Higgins.,1991. "Personal Computing: Toward a conceptual Model of Utilization". *Management Information System Quarterly*, 21(3).
- T Jurnal, Supomo, B, 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(2): 214-228.
- Tuten, T. L., & Neidermeyer, P. E., 2004. Performance, Satisfaction, and Turnover in Call Centers, The Effect of Stres and Optimism. *Journal of Business Research*, 14(1, pp:26-34).
- Tatar, M, 2010. Estonia Local Government Absorption Capacity of European Union Structural Funds. *Halduskultuur-Administrative Culture* 11 (2), 202-226. Tersedia di, <http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=estonia+ local+ Government+ Absorption+ Capacity+ of+ european+ union+ structural+ funds&btnG= Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara>.
- Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Uma Sekaran, 2009. *"Research Methods For Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)"* Penerbit Salemba Empat, Jakarta (119 - 124).
- Wilkinson, C. Kneer,1987. Information sistem for Accounting and Management, Concept, Applications, Technology, : *Essential concept and application* , Prentice Hall, Englewood Cliffs, USA.
- Wilson, K.R. 2010. Steward Leadship: Characteristics of The Steward Leader in Christian Nonprofit Organizations. *A Dissertation Presented for the Degree of PhD at The University of Aberdeen*.
- Wisnu Pamungkas, I Made Bagus, dkk. (2014). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, Kompleksitas Tugas Reputasi, Etika, dan Self Esteem Terhadap Budgetary Slack. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No: 1 Tahun 2014)*.
- Yuneita Anisma, Amir Hasan dan Sepri, 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, *JOM FEKOM Vol. 1*. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Zaman., G. and Cristea., A. 2011. EU Structural Funad Absorptoon in Romania: Obstacles And Issues. The journal of economic literature (JEL) Classification E22; F36; O19; O47. http://www.revecon.ro/articles/2011-1/2011_4.pdf. <http://arriple.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-procurement-pengadaan-barang.html>.
- Zarinah Monik, Darwanis dan Syukriy Abdullah, 2016. Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di

